



PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, PERTUMBUHAN UMKM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BALI

Deljansen Yohanes Thesia¹ Ni Luh Karmini²

Article history:

Submitted: 25 Agustus 2021
Revised: 3 September 2021
Accepted: 13 September 2021

Keywords:

Profitability;
Sales Growth;
Company Value;

Kata Kunci:

Profitabilitas;
Pertumbuhan Penjualan;
Nilai Perusahaan;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email: deljan08@gmail.com

Abstract

The population problem that is currently an obstacle and challenge for the Indonesian government is the problem related to the high level of poverty and the unemployment rate that occurs. Poverty and unemployment require comprehensive handling in an adequate regional scale. This study aims to: 1) analyze the simultaneous effect of per capita income, MSME growth and unemployment rate on the poverty rate in Bali Province; 2) analyze the partial effect of per capita income, the growth of MSMEs and the poverty rate in Bali Province. This study uses time series data, which is between 2010-2019. The type of data used is quantitative and qualitative data. The data used are data obtained from the Central Statistics Agency for the Province of Bali and the Central Statistics Agency in the Regency/City of the Province of Bali. The data were processed using multiple linear regression analysis techniques. The results of the research analysis show that: 1) Per capita income, MSME growth and the unemployment rate simultaneously have a significant effect on the poverty level in the Province of Bali; 2) Income per capita and MSME growth partially have a significant negative effect on the poverty level in Bali Province and the unemployment rate partially has a significant positive effect on the poverty level in Bali Province.

Abstrak

Masalah kependudukan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah Indonesia saat ini adalah permasalahan terkait tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang terjadi. Kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh serempak pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali; 2) menganalisis pengaruh parsial pendapatan per kapita, pertumbuhan UMKM dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data *time series* yaitu antara tahun 2010-2019. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data diolah dengan Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali; 2) Pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dan Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan yang menjadi hambatan dan tantangan pemerintah Indonesia saat ini adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran. Konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) terbentuk untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, namun konsep ini kemudian terganti oleh konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sudiarta & Suardana, 2016). Lahirnya konsep SDGs menyiratkan betapa pentingnya program mengurangi kemiskinan dan pengangguran di seluruh dunia. Menurut teori lingkaran setan kemiskinan dari Ragnar Nurske, menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan adalah tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan begitu seterusnya (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Arief & Fadhilah (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Masalah kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi fokus dunia, namun juga di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan perekonomian di Bali seketika melemah karena sektor utama pendorong perekonomian yaitu pariwisata mengalami kelumpuhan, yang menyebabkan industri perhotelan gulung tikar, banyak tenaga kerja mengalami PHK, dan upah kerja yang dikurangi. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengangguran di Bali mengalami peningkatan. Sejalan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang menerangkan bahwa pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah perkotaan Bali tercatat sebesar 1,30 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan tercatat sebesar 1,00 persen. Dibandingkan setahun lalu, TPT di perkotaan tercatat mengalami kenaikan 0,03 persen, sedangkan TPT di perdesaan tercatat menurun (-0,03) persen. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat kemiskinan di Bali meningkat. BPS menyatakan bahwa sekitar 53,17 persen UMB dan 62,21 persen UMK menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional, serta dampak pandemi secara umum membuat perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, yaitu sekitar 82,29 persen UMB dan 84,20 persen UMK mengalami penurunan pendapatan. Fenomena inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Bali mengalami peningkatan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal (sandang, pangan, papan, dan sosial) atau yang layak bagi kehidupannya. Kemiskinan bersifat dimensional yaitu kebutuhan manusia bermacam-macam maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek seperti aspek primer berupa miskin akan aset (Pande & Wenagama, 2017). Kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kemiskinan absolut, relative, dan kultural. Seseorang dikategorikan sebagai miskin absolut bila pendadapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal, sedangkan dikategorikan miskin relative bila proporsi distribusi pendapatannya tidak merata. Adhi (2016) menyatakan, kemiskinan kultural muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, yakni malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Lewis melihat kemiskinan sebagai cara hidup atau kebudayaan dan unit sarannya adalah mikro yaitu keluarga (Falikhah, 2016).

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Bali adalah adanya ketimpangan tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan UMKM pada masing-masing wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali diketahui bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak berada pada wilayah Bali timur. Pembangunan yang tidak merata yang terjadi di Provinsi Bali, diduga salah satunya disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi. Struktur perekonomian yang dimiliki oleh Provinsi Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini karena sebagian

besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor pariwisata, sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung (Purbadharmaja & Paramita, 2015). Namun kini sektor pariwisata di Bali juga mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingkat pendapatan per kapita penduduk Bali mengalami penurunan. Rahman & Alamsyah (2019) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan seseorang dengan pendapatan yang rendah disebut masyarakat miskin. Berbanding dengan hasil penelitian dari Paat dkk. (2018) yang menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian Arief & Fadhilah (2017) variabel pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Faktor berikutnya yang mempunyai hubungan dengan tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan UMKM, karena berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu sektor ekonomi potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terutama golongan menengah kebawah karena mampu menyerap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga jumlah pengangguran dapat menurun dan pada akhirnya tingkat kemiskinan berkurang (Megawati, 2019). Pertumbuhan UMKM juga dipercaya sebagai salah satu mesin utama dalam pengurangan angka kemiskinan (Augustin, 2015). Putra & Yasa (2018) serta Aristina dkk. (2017) menemukan hasil bahwa adanya pengaruh negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan memacu perusahaan menambah produksi barang dan jasa, sehingga akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja karena meningkatnya produksi barang dan jasa tersebut. Hal ini kemudian akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian Ikkal dkk. (2019) menemukan bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena UMKM mempunyai peran dalam pembangunan nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Pengangguran merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian Aristina dkk. (2017) menyatakan bahwa variabel pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan semakin merosot. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Penelitian serupa oleh Pramesti & Bendesa (2018) serta Darmawan & Wenagama (2017) juga menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, teori, dan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut: H₁: Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. H₂: Pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali H₃: Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan UMKM Penduduk dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan alasan bahwa

masih tingginya ketimpangan dan tingkat kemiskinan serta menurunnya tingkat pendapatan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali karena adanya perbedaan pendapatan per kapita dan pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota di Provinsi Bali serta akibat pandemi Covid-19. Adapun obyek penelitian ini adalah pendapatan per kapita, pertumbuhan UMKM, tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam periode tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif terakit variabel penelitian yang kemudian didukung oleh data kualitatif berupa teori dan konsep. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi non perilaku dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, browsing melalui website dan buku-buku literatur terkait variabel penelitian. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi *software* SPSS. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- X1 = pendapatan per kapita
- X2 = pertumbuhan UMKM
- X3 = tingkat pengangguran
- Y = tingkat kemiskinan
- μ = Variabel Pengganggu
- α = konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari masing-masing X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang beribukota provinsi di Denpasar. Secara geografis Pulau Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Di dunia, Bali dikenal sebagai tujuan wisata karena keunikan seni dan budayanya. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar. Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 ha dengan panjang pantai mencapai 529 km.

Sebelum adanya pandemic Covid-19, sector pariwisata menyumbang 53% terhadap ekonomi Bali, dan satu jutaan tenaga kerja diserap dari sektor pariwisata. Gubernur Bali bersama Bupati/Walikota se-Bali telah bersepakat untuk melaksanakan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 secara bertahap, selektif, dan terbatas dengan melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Membuka pariwisata bagi wisatawan Nusantara, melaksanakan program We Love Bali dengan menggerakkan wisatawan lokal. Hal ini dilakukan serangkaian mempersiapkan pariwisata Bali untuk menerima kunjungan wisatawan, dengan melaksanakan verifikasi fasilitas dan daya tarik wisata. Selain itu, program hot deal/ paket diskon yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan seperti paket tiket pesawat dengan hotel, tiket pesawat dengan aktivitas minat wisata khusus, atau paket dengan harga yang cukup terjangkau, tentu akan membuat wisatawan domestik

semakin banyak berlibur ke Bali. Selain itu, program staycation juga sangat diminati oleh masyarakat, menginap dan berlibur di tempat-tempat yang tidak terlalu jauh (di Bali saja) selama tidak lebih dari 5 hari. Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan protokol kesehatan dan melakukan verifikasi protokol kesehatan CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment) dibantu oleh industri pariwisata. Protokol kesehatan CHSE tersebut wajib diterapkan di seluruh sektor pelayanan publik dengan menekankan pada faktor Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan memperhatikan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan harapan Bali mendapatkan ‘trust’ atau rasa percaya dari wisatawan sebagai destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi.

Deskripsi variabel penelitian menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata dan standar deviasi. Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB Perkapita	90	1.271.382	9.369.152	3.764.703,33	1.585.878,59
Pertumbuhan UMKM	90	5,06	7,64	6,133	0,566
UMKM					
Tingkat pengangguran	90	686	29.724	5.228,40	4.779,79
Tingkat kemiskinan	90	9,30	45,90	20,36	8,79
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pendapatan per kapita memiliki nilai rata-rata sebesar 3.764.703,33 ribu rupiah, dengan nilai standar deviasi sebesar 1.585.878,59 ribu rupiah. Pendapatan per kapita paling rendah (minimum) adalah sebesar 1.271.382 ribu rupiah yang terjadi pada Kabupaten Bangli tahun 2010 dan pendapatan per kapita yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 9.369.152 ribu rupiah yang terjadi pada Kabupaten Badung di tahun 2019. Nilai standar deviasi Pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, yang berarti bahwa Pendapatan per kapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata.

Pertumbuhan UMKM memiliki nilai rata-rata sebesar 6,133 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,566 persen. Pertumbuhan UMKM paling rendah (minimum) adalah sebesar 5,06 persen yang diperoleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan Pertumbuhan UMKM yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 7,64 persen yang diperoleh Kabupaten Badung pada tahun 2012. Nilai standar deviasi Pertumbuhan UMKM lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, yang berarti bahwa Pertumbuhan UMKM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah merata.

Tingkat pengangguran memiliki nilai mean sebesar 5.228,40 yang berarti rata-rata jumlah tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah sebanyak 5.228 orang. Nilai standar deviasi variabel Tingkat pengangguran sebesar 4.779,79. Tingkat pengangguran paling rendah (minimum) adalah sebanyak 686 yang terjadi pada Kabupaten Bangli pada tahun 2017 dan Tingkat pengangguran yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 29.724 orang yang terjadi pada Kota Denpasar tahun 2010.

Tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 20,36 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 8,79 persen. Tingkat kemiskinan paling rendah (minimum) adalah sebesar 9,30 persen yang terjadi pada Kabupaten Klungkung tahun 2012 dan Tingkat kemiskinan yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 45,90 persen yang terjadi pada Kabupaten Buleleng di tahun 2010. Hasil

ini memberikan informasi bahwa dari sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2010-2019, yang memiliki Tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Buleleng.

Pengujian regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh profitabilitas (X_1) dan pertumbuhan penjualan (X_2) terhadap nilai perusahaan (Y) yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	39.410	16.039		2.457	.016
PDRB Perkapita	-4.770	1.156	-.270	-4.128	.000
Pertumbuhan UMKM	-24.855	1.677	-1.093	-14.819	.000
Pengangguran	1.246	.605	.094	2.058	.043

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 2, maka dapat dibentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 39,410 - 4,770X_1 - 24,855 X_2 + 1,246 X_3 + \mu$$

Nilai koefisien regresi variabel pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pendapatan per kapita (X_1), dan Pertumbuhan UMKM (X_2) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y), sedangkan nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran bernilai positif yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hasil yang diperoleh memenuhi asumsi dasar di dalam analisis regresi. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan *software* SPSS 24.0 disajikan sebagai berikut:

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data yang digunakan normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Sminarnov*. Apabila koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai *Kolmogorov Sminarnov (K-S)* sebesar 1,255, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,086. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,086 lebih dari nilai *alpha* 0,05.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF Kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM, dan tingkat pengangguran. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Jika tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute residual* atau nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai signifikansi dari variabel pendapatan per kapita sebesar 0,337, Pertumbuhan UMKM sebesar 0,462, dan tingkat pengangguran sebesar 0,870. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji ketepatan model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang diidentifikasi (Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM, dan tingkat pengangguran) tepat digunakan memprediksi Tingkat kemiskinan. Uji ini sering juga disebut dengan uji F. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($226,647 > 2,71$), maka Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil uji nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,888 mempunyai arti bahwa sebesar 88,8% variasi Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variasi Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM, dan tingkat pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 11,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mempunyai arti bahwa pendapatan per kapita secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Apabila pendapatan per kapita bertambah, maka tingkat kemiskinan akan berkurang. Nilai koefisien regresi = -4,770 berarti jika pendapatan per kapita mengalami peningkatan sejumlah 1 ribu rupiah, maka Tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sejumlah 4,770 ribu jiwa. Pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah, untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penduduk suatu wilayah perlu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Hasil ini memiliki makna bahwa semakin banyak atau tingginya pendapatan per kapita yang diterima suatu daerah, maka akan dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja maupun fasilitas penunjang yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan per kapita, maka akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di suatu daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menurunkan angka tingkat kemiskinan. Menurut teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) dari Ragnar Nurske menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal, rendahnya produktifitas, pendapatan rendah yang kembali menyebabkan tabungan rendah dan seterusnya (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya jumlah pendapatan per kapita maka akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arief & Fadhilah (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini juga sesuai dengan Rahman & Alamsyah (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan seseorang dengan pendapatan yang rendah disebut masyarakat miskin. Sehingga dapat diyakini bahwa terdapat pengaruh langsung antara pendapatan dengan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pertumbuhan UMKM terhadap tingkat kemiskinan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -24,855 $t_{hitung} = -14,819 < -1,987$. Hasil ini mempunyai arti bahwa Pertumbuhan UMKM secara parsial berpengaruh

negatif terhadap tingkat kemiskinan. Apabila Pertumbuhan UMKM bertambah, maka tingkat kemiskinan akan berkurang. Koefisien regresi sebesar $-24,855$ berarti jika Pertumbuhan UMKM meningkat sejumlah 1 persen, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sejumlah 24,855 ribu jiwa. Pertumbuhan UMKM yang cepat akan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan UMKM yang cepat dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan tingkat kemiskinan. Hasil ini membuktikan bahwa pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat berpengaruh dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah ini juga sangat berperan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ikbal dkk. (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena UMKM mempunyai peran dalam pembangunan nasional dan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, melalui kewirausahaan UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Tingkat pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan diperoleh nilai Signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ dengan $t_{hitung} = 2,058 > 1,987$. Hal ini berarti bahwa tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran bertambah, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Koefisien regresi sebesar $1,246$ berarti jika Tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar $1,246$ persen. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu program pemerintah untuk membantu pengangguran agar memperoleh pekerjaan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan *skill* yang dimiliki oleh angkatan kerja yang belum bekerja, sebagai bekal saat melakukan wawancara kerja dengan perusahaan. Program pemerintah tersebut tentunya dapat membantu mempercepat terserapnya tingkat pengangguran terbuka yang tidak memiliki keahlian khusus. Selain itu juga, pemerintah perlu mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk membantu tingkat pengangguran terbuka dalam hal pembukaan usaha untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya jumlah pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Aristina dkk. (2017) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan semakin merosot. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Pramesti & Bendesa (2018) serta Darmawan & Wenagama (2017) yang membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan Pendapatan per kapita, Pertumbuhan UMKM dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa apabila pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan, dan tingkat pengangguran semakin berkurang jumlahnya, maka akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa apabila pendapatan per kapita dan Pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan, maka akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil ini berarti bahwa apabila tingkat pengangguran dapat dikurangi jumlahnya, maka akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut. Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih terkait tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin rendah pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Provinsi Bali tetap menggalakkan program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah UMKM sehingga bisa menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Provinsi Bali lebih menggerakkan sektor informal untuk menekan tingkat kemiskinan karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi tingkat pengangguran. Saran Bagi Pelaku UMKM yakni diharapkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada waktu pandemi Covid-19 untuk mencari inovasi produk baru dan mencari peluang kerja baru yang di butuhkan pada saat pandemi ini, agar pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap stabil. Untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang ideal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar ekonomi mereka dapat kembali pulih. Kebijakan yang bisa dilakukan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (*cash money*) atau dengan cara memberikan keringanan membayar pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah juga harus mengadakan pelatihan agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini paham dengan adanya perubahan pemasaran konvensional menjadi pemasaran online, sehingga materi yang diberikan kaitannya untuk meningkatkan pemasaran secara digital agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap aksis di tengah pandemi covid-19.

REFERENSI

- Adhi, M.K., i.k. Ardana dan I.M. Maduriana. (2016). Faktor-kaktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 229-246.
- Arief, Muhammad., dan Diena Fadhilah. (2017). Pengaruh Pendapatan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Inflasi sebagai Pemoderasi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman*, 5(2), 66-79.
- Aristina, Ita., M.K.S. Budhi, I.G.A.P. Wirathi dan I.B. Darsana. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi. *E-Jurnal EP Unud*, 6(5). 677-704
- Augustin Kwasi Fosu. (2015). Growth, Inequality and Poverty in Sub-Saharan Africa: Recent Progress in a Global Context. *Oxford Development Studies*, 43 (1): 44-59.
- Darmawan, Agus Pande., dan I Wayan Wenagama. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6 (10): 1868-1895.
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).1-12.
- Ikbal, Muhammad., S.W. Mustafa dan L. Bustami. (2018). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4 (1). 35-46.

- Paat, D.C., R.A.M. Koleangan, dan V.A. Rumate. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado*. 1(1), 1-10.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Pramesti, Nyoma Ayu Tria dan I.K.G. Bendesa. (2018). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(9), 1887-1917.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin., dan U. Sulia Sukmawati. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. 6(2), 217-240.
- Putra, I.K.Y.D., dan I.G.W. Murjana Yasa. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Umr Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(11), 2461-2489.
- Rahman, Abdul., dan M.F. Alamsyah. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *Jurnal Economic Social and Development Studies (Ecces)*. 6(1), 111-129.
- Rahman, Abdul., dan M.F. Alamsyah. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *Jurnal Economic Social and Development Studies (Ecces)*. 6(1), 111-129.
- Sudiarta, I Nyoman, I Wayan Suardana. (2016). Dampak Pariwisata terhadap Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 209-227